



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Maret 2016

Halaman: 9

JAMIN PROSES VALIDASI KMS

Tim Penggerak PKK Dilibatkan Pendataan

YOGYA (KR) - Proses pendataan terhadap calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) kini turut melibatkan Tim Penggerak PKK yang ada di tiap wilayah. Keterlibatannya diharapkan mampu menjamin proses validasi calon pemegang KMS sekaligus memberikan penyadaran bagi masyarakat.

Selama ini, domain pendataan di wilayah hanya melibatkan perangkat RT dan RW. Dengan masuknya PKK, maka pengawasan bisa semakin intensif. "Ketua RW itu biasanya istrinya jadi penggerak PKK di wilayah setempat. Apalagi PKK juga kerap bersentuhan langsung dengan warga sehingga mengetahui persis kondisinya," ungkap Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Tri Maryatun di sela sosialisasi pendataan penduduk miskin, Senin (28/3).

Tri Maryatun menambahkan, kewenangan pendataan bagi Tim Penggerak PKK ialah dapat memberikan usulan terhadap warga yang dipandang berhak memperoleh KMS. Begitu juga sebaliknya, manakala ada warga yang dinilai mampu dan masuk sebagai pemegang KMS pun dapat diusulkan pencoretan.

Selain itu, petugas pendata yang melakukan verifikasi ke lapangan pun akan turut diawasi oleh PKK. Hal ini lantaran anggota PKK merupakan kaum ibu sehingga memiliki intensitas di rumah yang lebih besar.

"Paling tidak, PKK lebih tahu apakah petugas pendata betul-betul bertemu langsung dengan pihak yang didata atau tidak. Nanti saat ada bimbingan teknis bagi petugas pendata juga akan kami sampaikan jika kinerjanya diawasi oleh masyarakat," paparnya.

Ketugasan PKK yang tidak kalah penting, imbuh Tri Maryatun, ialah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa KMS bukan diminta namun murni hasil pendataan sesuai parameter yang ditetapkan. Selama ini, banyak anggapan yang salah sehingga tidak sedikit warga yang berbondong-bondong meminta KMS. Selama proses pendataan pun dipastikan bebas dari titipan.

Sementara total pemegang KMS 2016 ditetapkan sebanyak 18.730 KK atau 60.195 jiwa. Masing-masing didominasi kategori rentan miskin sebanyak 13.361 KK, disusul kategori miskin 5.335 KK dan fakir miskin 34 KK.

Sementara 2015, pemegang KMS sebanyak 18.881 KK atau 60.230 jiwa, dan tahun 2014 sebanyak 20.481 KK atau 64.699 jiwa. "Bulan ini kami sudah lakukan tahapan pendataan untuk KMS 2017, yakni berupa usulan dari masyarakat," tandasnya. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. TP. PKK/ Dekranasda			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005